

**EVALUASI PROGRAM BANTUAN PEMBANGUNAN
RUMAH LAYAK HUNI (BAPERLAHU)
(STUDI PADA KABUPATEN MESUJI TAHUN 2019)**

(Skripsi)

Oleh

MAHARANI KARIN K.

NPM 1616041032



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2021**

ABSTRAK

EVALUASI PROGRAM BANTUAN PEMBANGUNAN RUMAH LAYAK HUNI (BAPERLAHU) (STUDI PADA KABUPATEN MESUJI TAHUN 2019)

Oleh

MAHARANI KARIN K.

Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) merupakan salah satu permasalahan yang masih banyak di temui dalam lingkungan masyarakat. Oleh sebab itu masalah perumahan masih menjadi urusan wajib bagi Pemerintah Daerah. Kabupaten Mesuji merupakan salah satu daerah yang menjalankan Program Bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni (BAPERLAHU) karena masyarakat setempat sebagian besar belum menunjukkan eksistensinya dalam memajukan pembangunan. Hal ini dapat dilihat dari data Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Mesuji yang mencapai 15.678 pada tahun 2017. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi bagaimana hasil dari pelaksanaan program Bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni (BAPERLAHU) di Kabupaten Mesuji Tahun 2019 dan untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan program. Metode penelitian menggunakan penelitian kualitatif, jenis data yang digunakan adalah data primer dan skunder yang mana pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi, observasi dan wawancara. Secara umum hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi program Pembangunan Rumah Layak Huni (BAPERLAHU) di Kabupaten Mesuji tahun 2019 belum optimal. Rancangan program yang dibuat Pemerintah sudah cukup baik, namun dalam pelaksanaan di lapangan, masih banyak kendala yang ditemui seperti adanya penguluran waktu dalam pelaksanaan program di lapangan, kurangnya pengawasan dari pihak dinas, serta kurangnya Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM).

Kata Kunci : Evaluasi, Program, BAPERLAHU, MBR.

ABSTRACT

THE EVALUATION OF LIVABLE HOUSE DEVELOPMENT ASSISTANCE PROGRAM (BAPERLAHU) (STUDY AT MESUJI DISTRICT IN 2019)

By

MAHARANI KARIN K.

Uninhabitable Houses (RTLH) is one of the problems that are still often encountered in the community. Therefore, the housing issue is still a mandatory matter for the Regional Government. Mesuji Regency is one of the areas that run the Housing Development Assistance Program (BAPERLAHU) because most of the local communities have not shown their existence in advancing development. This can be seen from the data on Uninhabitable Houses (RTLH) in Mesuji Regency which reached 15,678 in 2017. The purpose of this study was to evaluate the results of the implementation of the Housing Development Assistance Program (BAPERLAHU) in Mesuji Regency in 2019 and to know what factors affect the implementation of the program. The research method uses qualitative research, the type of data used is primary and secondary data in which data collection uses documentation, observation and interview techniques. In general, the results of the study show that the evaluation of the Housing Development Program (BAPERLAHU) in Mesuji Regency in 2019 has not been optimal. The program design made by the Government is quite good, but in implementation in the field, there are still many obstacles encountered such as the delay in implementing the program in the field, lack of supervision from the department, and the lack of Community Assistance Personnel (TPM).

Keywords : Evaluation, Program, BAPERLAHU, MBR

**EVALUASI PROGRAM BANTUAN PEMBANGUNAN
RUMAH LAYAK HUNI (BAPERLAHU)
(STUDI PADA KABUPATEN MESUJI TAHUN 2019)**

Oleh

MAHARANI KARIN K.

Skripsi

**Sebagai Salahsatu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

Pada

**Jurusan Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2021**

Judul Skripsi : **Evaluasi Program Bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni (BAPERLAHU) (Studi pada Kabupaten Mesuji Tahun 2019)**

Nama Mahasiswa : Maharani Karin K.

No. Pokok Mahasiswa : 1616041032

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

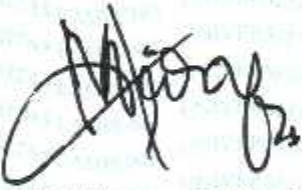
MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Eko Budi Sulistio, S.Sos., M.AP
NIP. 19780923 2003121 001


Ita Prihantika, S.Sos., M.A
NIP. 19840630 201504 2 002

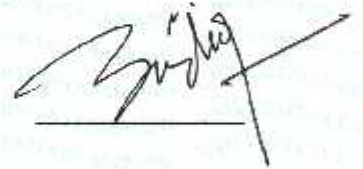
2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara


Meiliyana, S.IP., M.A.
NIP. 19740520 200112 2 002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Eko Budi Sulistio, S.Sos., M.AP



Sekretaris : Ita Prihantika, S.Sos., M.A



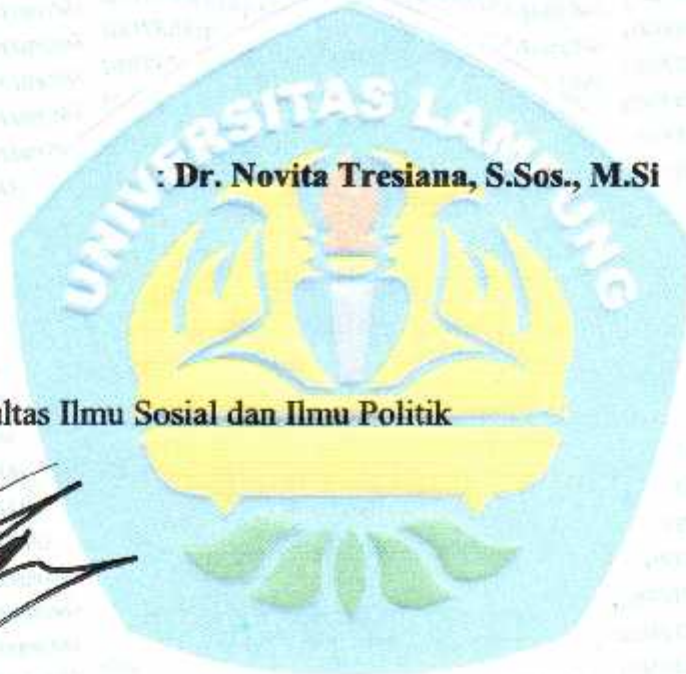
Anggota : Dr. Novita Tresiana, S.Sos., M.Si



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP. 19610807 198703 2 001



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 03 September 2021

PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi/Laporan Akhir ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana/Ahli Madya), baik Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dari karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Bandar Lampung, 03 September 2021
Yang membuat pernyataan,



Maharani Karin K.
NPM. 1616041032

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Maharani Karin K, Lahir di Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, pada tanggal 16 November 1998. Penulis merupakan anak pertama dari lima bersaudara dari pasangan Bapak Karnadi dan Ibu Iin Marlina. Memulai jenjang pendidikan TK 02 Satu Atap Simpang Pematang pada tahun 2004. Selanjutnya pada tahun 2010 menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar (SD) Negeri 02 Simpang Pematang, lalu pada tahun 2013 menyelesaikan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri 01 Seritanjung Mesuji kemudian penulis menyelesaikan pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 01 Simpang Pematang pada tahun 2016.

Pada tahun 2016 penulis terdaftar sebagai mahasiswa pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung dan tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara (HIMAGARA) FISIP UNILA, Forum Studi Pengembangan Islam (FSPI) FISIP UNILA, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM U) KBM UNILA, dan Generasi Baru Indonesia (GenBI). Pada tahun 2019 di bulan januari sampai february penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Kalipapan Kabupaten Way Kanan selama 40 Hari. Lalu pada tahun 2019 di bulan juli sampai agustus, penulis

melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Kantor SAMSAT Rajabasa di Bagian UPTD Pendapatan Wilayah Kota Bandar Lampung.

Selama menimba ilmu di Universitas Lampung, penulis juga turut aktif dalam beberapa organisasi kemahasiswaan. Keikutsertaan penulis dalam organisasi kampus dimulai sejak penulis bergabung dengan Divisi HUMAS (Hubungan Masyarakat) Himagara (Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara) FISIP UNILA pada tahun 2016. Selanjutnya aktif di Forum Studi Pengembangan Islam (FSPI) FISIP UNILA bidang DANUS (Dana Usaha) pada tahun 2016 sampai 2018, lalu aktif di Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas (BEM U) KBM UNILA di Kementerian Sosial dan Politik pada tahun 2016 sampai 2017 dan Kementerian Advokasi Mahasiswa pada tahun 2017 sampai 2018. Selanjutnya penulis pernah menjadi bagian dari GenBI (Generasi Baru Indonesia) KPW Lampung sebagai penerima beasiswa dari Bank Indonesia pada tahun 2018 sampai tahun 2019. Selain itu penulis juga aktif mengikuti kegiatan kegiatan kampus dengan mempunyai sekitar 30 Sertifikat dari berbagai kegiatan yang telah diikutinya selama menjadi mahasiswa jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIP UNILA.

MOTTO

“You never fail until you stop trying.”

(Albert Einstein)

**“Tidak masalah seberapa lambat kamu berjalan,
asalkan kamu tidak berhenti”.**

(Coffucius)

“Bergerak, Bergerak, Berdampak.”

(Najwa Shihab)

**“Percayalah disetiap *do'a ada jawaban,*
*disetiap jawaban ada sebab .”***

(Maharani Karin K.)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap rasa syukur kepada Allah SWT
Maha syukur ku kepada Allah SWT, atas segala
hikmat dan kekuatan jiwa yang tak pernah lelah
berjalan bersama langkah-langkah kecil ku
sepanjang hidup ini Kupersembahkan karya kecilku
ini untuk orang-orang yang menyayangiku:

Papa, Mama, dan Adik-adikku

Yang selalu memberikan kekuatan untuk menjalani
semua proses ini dan yang selalu memberikan
dukungan, nasehat, dan kasih sayangnya yang tiada
henti.

***Segenap keluarga besar yang selalu mencurahkan
dukungan dan doanya kepadaku sahabat-sahabat
yang selalu ada dan setia menemaniku saat suka
maupun duka Para Dosen dan Civitas Akademika***

Yang telah memberikan bekal ilmu, dukungan, dan
doa agar bisa sukses kedepannya.

Almamater Tercinta Universitas Lampung Tercinta

SANWACANA

Alhamdulillah robbil ‘alamiin, puji syukur selalu tercurah kepada Allah Subhaanahu Wata’ala Tuhan seluruh alam dan segala isinya, pemilik segala cinta, pemilik rahmat, yang rohmaan dan rohiim, serta atas maha kuasa Nya, skripsi dengan judul **“EVALUASI PROGRAM BANTUAN PEMBANGUNAN RUMAH LAYAK HUNI (BAPERLAHU) Studi pada Kabupaten Mesuji Tahun 2019”** ini telah selesai pada waktu terbaik menurut perencanaan-NYA. Sholawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan, suritauladan yaitu Rasulullah Muhammad Sholallahu ‘alaihi wasalaam yang senantiasa kita nantikan syafa’atnya di yaumul qiyamah nanti. Dan tak lupa rasa syukur selalu tercurah karena kita terlahir sebagai ummat Rasulullah Sholallahu ‘alaihi wasalam, yang telah membawa dari zaman jahiliyyah kepada zaman yang terang benderang. Selama proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari ada banyak sekali pihak yang membantu dari berbagai aspek, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Karomani, M.S selaku Rektor Universitas Lampung dan para jajarannya. Terimakasih atas bantuannya selama saya menjadi mahasiswa di Universitas Lampung, saya bangga akan almamater tercinta saya, UNILA JAYA! Hidup Mahasiswa!.
2. Ibu Dra.Ida Nurhaida, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. beserta jajarannya. Terimakasih telah membantu setiap urusan akademik penulis.
3. Bapak Eko Budi Sulistio, S.Sos., M.AP selaku dosen pembimbing utama. Terimakasih banyak atas bimbingan, arahan, ilmu, waktu, nasehat, dan tenaga selama ini. Terimakasih telah menjadi mentor yang baik, Terimakasih banyak bapak, mohon maaf atas kesalahanku, semoga Allah menjaga bapak dan keluarga selalu dalam kebaikan.

4. Ibu Ita Prihantika, S.Sos.M.Si selaku dosen pembimbing kedua. Ibu sangat baik, sabar dan telaten menghadapi mahasiswa bimbingannya yang bandel, termasuk saya. Selalu mengingatkan dan memberi semangat, tetaplah seperti ini bu, bersahaja dalam kebaikan. Terimakasih atas bimbingan, arahan, kesabarannya selama ini dalam memberikan bimbingan. Semoga ibu dan keluarga selalu berada dalam naungan rahmat, hidayah Allah.
5. Ibu Dr. Novita Tresiana, S.Sos., M. Si. selaku dosen pembahas dan penguji. Terimakasih atas kesabaran dan arahnya dalam proses penyusunan kripsi, serta banyak hal akademis yang saya hadapi, tetap memotivasi dan menginspirasi dengan cara ibu yang khas. Semoga ibu dan keluarga selalu dalam naungan kebaikan dan rahmat Allah.
6. Ibu Meiliyana, S.I.P.,M.A., selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara. Terimakasih atas bantuan dan kemudahan dalam proses perkuliahan. Semoga ibu sekeluarga selalu dalam naungan rahmat Allah.
7. Seluruh dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Bapak Dr. Bambang Utoyo, Prof. Dr. Yulianto, M.S., Bapak Eko Budi Sulistio, S.Sos., M.A.P., Ibu Dewie Brima Atika, S.I.P, M.Si., Bapak Simon Sumanjoyo H, S.A.N., M.P.A., Bapak Syamsul Ma'arif, S.I.P., M.Si., Ibu Rahayu Sulistiowati, S.Sos., M.Si., Ibu Dr.Novita Tresiana, , Ibu Meiliyana, S.I.P., M.A., Ibu Devi Yulianti, S.A.N., M.A., Ibu Dra.Dian Kagungan, M.H., Ibu Ita Prihantika, S.Sos., M.A., Bapak Izzul Fatchu Reza, S.A.N., M.P.A., Ibu Anisa Utami, S.I.P., M.A., Bapak Dodi, terimakasih banyak atas setiap pembelajaran dan ilmu yang diberikan kepada saya.
8. Kedua orangtuaku: Papaku Karnadi, Sang kepala dalam keluarga, tegas dan sabar dalam menghadapi situasi tersulit pun, papa adalah manusia pekerja keras yang selalu memikirkan keluarganya dimana pun dan kapan pun. Mamaku Iin Marlina, sebagai perempuan yang dengan tulus membesarkan dan menyayangiku, tempat segala mengadu lelah dan curhatku. Semoga mama papa selalu diberi kekuatan dan kesehatan. Amiiin ya Rabbal`alamin.
9. Adik-adikku tersayang, M. Bisma Yadinata, M. Wisnu Wardhani, Finkan Mutiara Laut, Hikmah Permata teruslah semangat, mari bersama kita kejar

angan dan mimpi kita. Semoga Allah ta'ala merahmati kita sekeluarga, melimpahkan berkah dan nikmatnya, dan mempertemukan kita sekeluarga dalam susana paling dicita-citakan semua manusia, di jannah-Nya yang abadi. Amiiin ya Rabbal`alamin.

10. Suamiku tercinta, terimakasih atas segala dukungan dan semangatnya yang slalu diberikan kepadaku. Semoga keluarga kecil kita diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki oleh Allah SWT. Amiiin ya Rabbal`alamin.
11. Shanum Armahira gadis kecilku tersayang, penyemangat dalam setiap lelahku, terimakasih atas hadirnya engkau di dalam hidupku. Semoga hidupmu selalu diberkahi dan diberi kesehatan dan umur yang panjang. Amiiin ya Rabbal`alamin.
12. Keluarga besarku yang selalu *support* selama ini, selalu membantu dikala susah, selalu ada saat aku membutuhkan. Semoga kelak kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT. Amiiin ya Rabbal`alamin.
13. Bapak Azhari, Bapak Jo, dan Mba Wulan selaku staff Jurusan Ilmu Administrasi Publik. Terimakasih atas kesabaran dalam membantu mengurus hal-hal yang berkaitan dengan administrasi perkuliahan, yang cukup rumit dan butuh ketelatenan. Semoga bapak dan ibu selalu dalam naungan rahmat Allah.
14. Staff Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Terimakasih telah membantu segala urusan yang dibutuhkan penulis selama ini. Baik urusan akademik maupun non akademik.
15. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Mesuji dan seluruh jajaran. Terimakasih banyak atas bantuannya dalam pengambilan data penelitian.
16. Teman-teman ALASKA (Angkatan Delapan Belas Ilmu Administrasi Publik). Terimakasih atas kebersamaan, warna, dan cerita semasa kuliah, sukses terus untuk kita semua. Hidup Himagara!
17. Senior-senior HIMAGARA FISIP Unila dari angkatan 1999 sampai 2015 dan Kawan-kawan HIMAGARA FISIP Unila dari angkatan 2017 sampai 2019 yang saya banggakan. Terimakasih untuk semua banyak pengalaman

dan pertemanan yang epic, yang mewarnai kehidupan kuliah penulis.

18. Kawan-kawan seluruh HMJ/HMD/UKM Universitas Lampung yang saya banggakan. Terimakasih atas kerjasamanya, tetap semangat. Hidup Mahasiswa!
19. Teman-teman Kelompok KKN Desa Kalipapan Kabupaten Way Kanan Periode I tahun 2019. Terimakasih atas kerjasamanya selama KKN di desa Kalipapam. Sukses selalu untuk kita semua.
20. Semua pihak yang membantu secara langsung atau tidak langsung selama penulis kuliah sampai dengan penyelesaian skripsi ini. Skripsi ini ditulis dengan usaha yang maksimal sesuai dengan kemampuan peneliti.

Jika masih terdapat banyak kekurangan, dapat dijadikan evaluasi atau penelitian selanjutnya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang memerlukannya.

Bandar Lampung, September 2021
Penulis,

Maharani Karin K
NPM. 1616041032

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR TABEL.....	1
DAFTAR GAMBAR.....	1
1. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Manfaat Penelitian.....	8
2. TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1. Kebijakan Publik	10
2.1.1 Pengertian Kebijakan Publik	10
2.1.2 Karakteristik Kebijakan Publik	12
2.1.3 Jenis-Jenis Kebijakan Publik	13
2.1.4 Proses Kebijakan Publik	15
2.1.5 Program BAPERLAHU Sebagai Kebijakan Publik.....	17
2.2. Program Bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni oleh Pemerintah	18
2.2.1 Pengertian Program	18
2.2.2 Program Bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni (BAPERLAHU) 18	
2.3. Evaluasi Kebijakan Publik	20
2.3.1 Pengertian Evaluasi	20
2.3.2 Langkah-Langkah Evaluasi	21
2.3.3 Evaluasi Program.....	22
2.3.4 Tujuan Evaluasi Program.....	25

2.3.5 Indikator Keberhasilan Program.....	26
2.4. Status Sosial Ekonomi	32
2.4.1 Tingkatan Status Sosial Ekonomi.....	33
2.5. Perumahan dan Permukiman	34
2.5.1 Pengertian Perumahan dan Permukiman	34
2.5.2 Permasalahan Perumahan dan Permukiman di Indonesia	35
3. METODE PENELITIAN.....	37
3.1. Tipe Penelitian	37
3.2. Fokus Penelitian	38
3.3. Lokasi Penelitian	39
3.4. Jenis dan Sumber Data	40
3.4.1 Jenis Data	40
3.4.2 Sumber Data	41
3.5. Instrument Penelitian	44
3.6. Teknik Pengumpulan Data	45
3.6.1 Wawancara.....	45
3.6.2 Observasi.....	46
3.6.3 Dokumentasi	47
3.7. Teknik Analisis Data	49
3.7.1 Reduksi Data (<i>Data Reduction</i>).....	49
3.7.2 Penyajian Data (<i>Data Display</i>).....	50
3.7.3 Penarikan Kesimpulan (<i>Concluding Drawing</i>)	50
3.8. Teknik Keabsahan Data	51
3.8.1 Uji Kredibilitas (<i>Credibility</i>)	51
3.8.2 Uji Keteralihan (<i>Transferability</i>).....	55
3.8.3 Uji Kebergantungan (<i>Dependability</i>).....	56
3.8.4 Uji Kepastian (<i>Confirmability</i>).....	57
4. HASIL DAN PEMBAHASAN	58
4.1. Gambaran Umum	58
4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Mesuji.....	58

4.1.2	Gambaran Umum Dinas Perkim Kabupaten Mesuji.....	62
4.1.3	Gambaran Umum Program Bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni (BAPERLAHU) di Kabupaten MESUJI	63
4.2.	Hasil dan Pembahasan	69
4.2.1	Pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni (BAPERLAHU) di Kabupaten Mesuji Tahun 2019	69
4.2.2	Kelompok Sasaran Penerima Bantuan	105
4.2.2	Kontribusi Masyarakat Penerima Bantuan	108
4.3.	Faktor-faktor yang mempengaruhi Bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni (BAPERLAHU) di Kabupaten Mesuji Tahun 2019	110
4.3.1	Intervensi Politik.....	110
4.3.2	Minimnya Tingkat Swadaya Masyarakat	111
4.3.3	Tingkat Disiplin Tenaga Pendamping Masyarakat	112
4.3.4	Pengawasan Pihak Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	112
5.	KESIMPULAN DAN SARAN	114
5.1.	Kesimpulan	114
5.2.	Saran.....	115

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Rekap Verifikasi Bantuan Rumah Layak Huni Kab. Mesuji	3
2. APBD BAPERLAHU 2013-2018	4
3. Skema umum penilaian evaluasi	29
4. Data Informan Penelitian.....	42
5. Daftar Dokumen Penelitian.....	48
6. Contoh Triangulasi.....	53
7. Luas wilayah Kabupaten Mesuji Berdasarkan Kecamatan.....	60
8. Anggaran BAPERLAHU 2019.....	78
9. Presentase Kategori RTLH Tahun 2017.....	83
10. Total Rehabilitasi RTLH 2013-2019	95
11. Kondisi Sebelum Dan Sesudah Pelaksanaan Program BAPERLAHU.....	103
12. Matrik Indikator Kinerja.....	104
13. Data penerima BAPERLAHU 2019	106

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Komponen Dalam Analisis Data	51
2. Peta wilayah Administratif Kabupaten Mesuji.....	59
3. Pembahasan Peraturan Bupati No.39 Tahun 2017 Tentang BAPERLAHU	71
4. Pelaksanaan Verifikasi Data Calon Penerima BAPERLAHU	72
5. Pelaksanaan Tinjau Lokasi Calon Penerima BAPERLAHU.....	72
6. Salahsatu Proses Seleksi Penerimaan TPM	73
7. Rumah Tidak Layak Huni	84
8. Rancangan Rumah Penerima BAPERLAHU	85
9. Penurunan Material	81
10. Swadaya masyarakat Pembangunan Pondasi.....	86
11. Penyelesaian pembangunan tahap I	87
12. Pembangunan tahap II.....	88
13. Penyelesaian Pembangunan tahap III	89
14. Contoh Rumah BAPERLAHU di Kec. Mesuji	93
15. Contoh Rumah BAPERLAHUKec. Simpang Pematang	94
16. Contoh Rumah BAPERLAHU Kec. Mesuji Timur.....	94

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perumahan dan permukiman merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan yang merupakan suatu tempat yang digunakan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia karena didalamnya mengandung aspek pembelajaran nilai-nilai peningkatan mutu kehidupan manusia. Dengan terpenuhinya salah satu kebutuhan dasar berupa rumah yang layak huni diharapkan tercapai ketahanan didalam suatu keluarga.

Menurut UU No 1 Tahun 2011 tentang perumahan, rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. Sedangkan permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan. Dalam hal ini, pembangunan perumahan dan

permukiman harus layak sehingga masyarakat dilingkungan tersebut dapat mengembangkan diri dengan baik dan beradab.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Pemda), dijelaskan dan diamanatkan bahwa perumahan merupakan salah satu bidang yang menjadi urusan wajib Pemerintah Provinsi dan Pemerintahan Kota/Kabupaten. Oleh sebab itu, perumahan dan permukiman masyarakat juga menjadi objek penting yang turut serta dikembangkan kebijakannya oleh pemerintah di Indonesia untuk menanggulangi permasalahan-permasalahan yang ada di daerah. Untuk mendukung program penyediaan perumahan bagi masyarakat yang membutuhkan (masyarakat kurang mampu), pemerintahan pusat telah mengatur terkait pelaksanaan penyediaan perumahan layak huni yang tertuang didalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan. Regulasi ini memberikan hak kepada pemerintah daerah untuk memperbaiki dan membantu masyarakat di daerah setempat untuk memberikan bantuan bangunan perumahan.

Adapun yang termasuk kriteria rumah yang tidak layak huni dan menjadi tolak ukur pemberian bantuan pembangunan rumah layak huni adalah rumah yang tidak sehat dan tidak adanya sumber air yang memadai, memiliki ukuran yang relatif kecil, tidak adanya fasilitas MCK, rumah rusak dan tidak layak untuk ditinggali, memiliki dinding yang hanya terbuat dari bambu atau papan yang

sudah rapuh, struktur konstruksi atap yang tidak memadai, dan tidak memiliki utilitas jaringan listrik untuk kebutuhan sehari-hari.

Kabupaten Mesuji merupakan salah satu daerah yang saat ini menjalankan program bantuan pembangunan rumah layak huni. Masyarakat setempat yang sebagian besar mata pencaharian sebagai petani, industri rumahan, ataupun nelayan bagi masyarakat yang tinggal di daerah perairan belum menunjukkan eksistensinya dalam memajukan pembangunan. Hal ini dapat dilihat dari rumah yang ditinggali masyarakat setempat yang sebagian besar adalah rumah yang tidak layak untuk ditinggali. Berikut ini tabel rekap hasil verifikasi Bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni (BAPERLAHU) Kabupaten Mesuji.

Tabel 1. Rekap Verifikasi Rumah Tidak Layak Huni Kab. Mesuji

No.	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Rumah	Jumlah RTLH
1.	Mesuji	11	6.074	3.907
2.	Mesuji Timur	20	9.748	2.784
3.	Rawajitu Utara	13	6.953	1.752
4.	Way Serdang	20	11.480	1.398
5.	Simpang Pematang	13	7.262	1.720
6.	Panca Jaya	7	4.585	1.003
7.	Tanjung Raya	21	10.635	3.114
TOTAL			56.737	15.678

(Sumber : Data Tim verifikasi BAPERLAHU Kabupaten Mesuji, 20170)

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa dari 56.737 rumah penduduk yang ada di Kabupaten Mesuji dan sebanyak 15.678 merupakan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan merupakan target sasaran penerima Bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni (BAPERLAHU) yang berasal dari Masyarakat Berpenghasilan

Rendah (MBR) yang ada di Kabupaten Mesuji, jompo, ataupun penyandang disabilitas yang memiliki rumah tidak layak huni di atas tanah yang dimilikinya sendiri ataupun tanah hibah.

Dana yang dikeluarkan untuk pembangunan rumah layak huni ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mesuji. Sampai pada tahun 2018 Kabupaten Mesuji melakukan penanganan rumah tidak layak huni dengan total 9.048 penerima. Adapun total anggaran yang didapatkan untuk Program Bantuan Rumah Layak Huni (BAPERLAHU) yang ada di kabupaten Mesuji pada tahun 2013-2018 adalah sesuai tabel 2 berikut :

Tabel 2. APBD BAPERLAHU Tahun 2013-2018

TAHUN ANGGARAN APBD	2013 – 2018	
	Rumah Kita	Stimulan
Jenis Bantuan		
Jumlah Penerima	1.640	3.973
Total Penerima	5.613	
Jumlah Dana	44.960.000.000	50.220.500.000
TOTAL DANA	95.180.500.000	

(Sumber : Dokumen Dinas Perkim, 2019)

Pembangunan Rumah Layak Huni (BAPERLAHU) terus berjalan hingga saat ini. Hal itu terlihat dari perencanaan target yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk pengentasan rumah yang tidak layak huni untuk tahun 2019. Menurut Andre Alrendra, Kabid Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Mesuji, target pembangunan perumahan yang telah ditetapkan untuk program

pembangunan rumah layak huni tahun 2019 adalah 564 unit dengan anggaran sebesar Rp.16,3 miliar (www.mesujikab.go.id., 2019).

Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Mesuji dalam hal ini merupakan Pemerintah yang berwenang sebagai pembina, pengawas, dan pengendali dalam program Bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni (BAPERLAHU). Oleh sebab itu, sudah selayaknya Dinas Perumahan dan Permukiman memahami kondisi dan pelaksanaan program Bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni (BAPERLAHU) dilapangan. Saat melakukan *crosscheck* di lapangan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Mesuji menemukan masalah di Kecamatan Way Serdang bahwa adanya manipulasi data oleh Kepala Desa setempat dengan memberikan bantuan perumahan kepada anak kandungnya, sedangkan dari pantauan di lapangan terlihat bahwa rumah penerima tersebut tidak sesuai dan bentuk bangunan sangat berbeda dengan yang dibangun oleh Pemkab Mesuji (Samarin, 2019).

Fenomena lain dari pelaksanaan program perbaikan rumah layak huni juga kerap terjadi di beberapa daerah yang menjalankan program pembangunan rumah layak huni, seperti di Kabupaten Kepulauan Anambas, permasalahan serupa dalam pembangunan rumah layak huni terjadi karena kurang selektifnya Dinas dalam memverifikasi dan menetapkan penerima bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sehingga ada penerima dengan pendapatan yang tetap dan berpenghasilan tinggi mendapatkan bantuan pembangunan RTLH (Khoris, 2013).

Permasalahan lain yang juga timbul dalam pelaksanaan pembangunan rumah layak huni adalah proses pembangunan yang melebihi batas waktu yang ditentukan dan bahan bangunan yang datang berkualitas kurang baik (Widayanti, 2019).

Selain permasalahan dalam pelaksanaannya, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Mesuji dinilai sangat lemah dalam pengawasan. Hal ini disampaikan oleh anggota DPRD Kabupaten Mesuji pada saat *hearing* dengan Dinas Perumahan dan Permukiman. Pengawasan oleh pihak Dinas dianggap kurang sehingga terjadi sejumlah permasalahan dalam program pembangunan, seperti tidak selesainya ratusan rumah program pembangunan tahun anggaran 2016/2017 dan 2018 (Pepadunnews, 2019). Padahal, pengawasan dan pengendalian sangat penting untuk masukan dan perbaikan dalam pelaksanaan bantuan pembangunan rumah swadaya layak huni. Fungsi pengawasan dan pengendalian dilakukan agar dana anggaran dan pelaksanaan pembangunan/peningkatan rumah yang dibangun secara swadaya oleh secara tepat sasaran, tepat penggunaan, dan akuntabel (Ratih, 2018).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Evaluasi Program Bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni (BAPERLAHU) Studi Pada Kabupaten Mesuji Tahun 2019”**

1.2 Rumusan Masala

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

- 1.2.1 Bagaimana hasil evaluasi pelaksanaan program Bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni (BAPERLAHU) dalam mengentaskan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sesuai target sasaran yang ada di Kabupaten Mesuji tahun 2019 ?
- 1.2.2 Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi hasil program Bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni (BAPERLAHU) dalam mengentaskan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Mesuji ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan-permasalahan pokok yang terdapat dalam penelitian ini, maka terdapat tujuan dari penelitian yang merupakan hal yang hendak dicapai dalam melakukan suatu kegiatan yang telah dirumuskan oleh peneliti adalah :

- 1.3.1 Untuk mengetahui bagaimana hasil evaluasi pelaksanaan program Bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni (BAPERLAHU) dalam mengentaskan rumah masyarakat yang tidak layak huni sesuai target sasaran yang ada di Kabupaten Mesuji tahun 2019.

1.3.2 Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi hasil program Bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni (BAPERLAHU) dalam mengentaskan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Mesuji.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk kepentingan-kepentingan dalam pendidikan baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu dan pengetahuan dalam kajian teori-teori khususnya dibidang perumahan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini berguna sebagai berikut :

a. Bagi bidang akademis

Hasil penelitian ini diharapkan untuk menyumbangkan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian selanjutnya bagi civitas Universitas Lampung.

b. Bagi pemerintah Kabupaten Mesuji

Sebagai input bagi pemerintah Kabupaten Mesuji dalam pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan sebagai mengambil keputusan terkait pelaksanaan program pembangunan rumah layak huni di Kabupaten Mesuji kedepannya.

c. Bagi masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan informasi serta penambahan pengetahuan bagi masyarakat mengenai program pembangunan oleh pemerintah serta sebagai masukan bagi *stakeholder* dalam pengambilan keputusan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kebijakan Publik

2.1.1. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan keputusan-keputusan atau pilihan yang ditetapkan oleh pemangku kekuasaan untuk mengolah atau mendistribusikan suatu kebijakan publik demi kehidupan khalayak banyak, masyarakat umum, penduduk, ataupun warga negara, yang bersumber dari kekayaan alam, finansial, ataupun manusia dengan tujuan untuk mencapai kepentingan bersama. Ada beberapa definisi kebijakan publik yang dikemukakan oleh para ahli sebagai berikut :

- a. Dye dalam Santosa (2008) memberikan definisi bahwa kebijakan publik adalah “*Whatever governments choose to do or not to do*” yang didefinisikan apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk bertindak atau tidak bertindak. Walaupun batasan yang diberikan oleh Dye dianggap agak tepat, namun batasan ini tidak cukup memberi

pembeda yang jelas antara apa yang diputuskan oleh pemerintah untuk dilakukan dan apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah.

- b. Friedrich dalam Santosa (2008), kebijakan publik ialah seperangkat tindakan yang dilakukan pemerintah dengan suatu tujuan dan diarahkan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.
- c. Edward dalam Hayat (2018) lebih lanjut menjelaskan bahwa kebijakan publik dapat diterapkan secara jelas dalam peraturan perundang-undangan dalam bentuk pidato-pidato pejabat teras pemerintahan ataupun berupa program-program dan tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah.

Berdasarkan definisi-definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik dibuat oleh pemerintah yang berupa tindakan-tindakan pemerintah baik untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu karena tujuan tertentu demi kepentingan masyarakat. Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa pengetahuan tentang kebijakan publik adalah pengetahuan tentang sebab-sebab, konsekuensi dan kinerja kebijakan dan program publik, sedangkan pengetahuan dalam kebijaksanaan publik adalah proses menyediakan informasi dan pengetahuan untuk para eksekutif, anggota legislatif, lembaga peradilan, dan masyarakat umum yang berguna dalam proses perumusan kebijakan serta yang dapat meningkatkan kinerja kebijaksanaan.

Adapun konteks dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan kebijakan publik adalah sebuah kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk menanggulangi sebuah fenomena sosial yang terjadi dilingkungan masyarakat yang bertujuan untuk memecahkan dan mengatasi kemiskinan khususnya di bidang perumahan dan permukiman yang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, kebijakan publik yang diambil oleh pemerintah dalam mengatasi permasalahan bidang perumahan dan permukiman tersebut ialah berupa program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

2.1.2. Karakteristik Kebijakan Publik

Menurut Nugroho (2011) karakteristik dari kebijakan publik didasari pernyataan bahwa kebijakan publik merupakan segala sesuatu yang dikerjakan dan tidak dikerjakan oleh pemerintah. Ada dua karakteristik dari kebijakan publik itu sendiri, yaitu :

- a. Kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah untuk dipahami, karena maknanya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional.
- b. Kebijakan publik merupakan sesuatu yang dapat diukur, karena ukurannya jelas yakni sejauh mana pencapaian kemajuan cita-cita sudah ditempuh.

2.1.3. Jenis – jenis kebijakan Publik

Menurut Anderson sebagaimana dikutip dalam Suharno (2010) menyampaikan jenis-jenis kebijakan publik sebagai berikut :

a. Kebijakan substantif versus kebijakan procedural

Kebijakan substantif merupakan suatu kebijakan yang dilihat dari substansi masalah yang dihadapi pemerintah. Sedangkan kebijakan prosedural yaitu suatu kebijakan yang dilihat dari pihak-pihak yang terlibat dalam perumusannya bagaimana kebijakan substantif tersebut dijalankan.

b. Kebijakan distributif, kebijakan regulatori & kebijakan redistributive

Kebijakan distributif yakni kebijakan yang menyangkut pelayanan atau kemanfaatan pada masyarakat atau individu. Kebijakan regulatori merupakan kebijakan yang berupa pembatasan atau pelarangan terhadap perilaku individu atau kelompok masyarakat. Sedangkan kebijakan redistributif merupakan kebijakan yang mengatur alokasi kekayaan, pendapatan, pemilikan, atau hak-hak diantara berbagai kelompok dalam masyarakat.

c. Kebijakan material versus kebijakan simbolik

Kebijakan material adalah kebijakan yang memberikan keuntungan sumber daya komplet pada kelompok sasaran. Sedangkan kebijakan

simbolis adalah kebijakan yang memberikan manfaat simbolis kepada kelompok sasaran.

- d. Kebijakan yang berhubungan dengan barang umum (*public goods*) dan barang privat (*private goods*)

Kebijakan *public goods* adalah kebijakan yang mengatur pemberian dan penyediaan barang-barang/ pelayanan-pelayanan oleh pemerintah untuk kepentingan orang banyak. Sedangkan *private goods* yakni suatu kebijakan yang mengatur tentang penyediaan pelayanan atau barang-barang oleh pihak swasta, untuk kepentingan individu atau perorangan di pasar bebas dengan imbalan tertentu.

Adapun dalam penelitian ini, jenis kebijakan publik yang digunakan adalah kebijakan material (*material policy*) yang mana kebijakan yang diambil oleh pemerintah mengatur tentang pengalokasian atau penyediaan sumber-sumber material yang nyata bagi penerimanya dan memberikan keuntungan sumber daya yang komplit bagi penerima atau kelompok sasaran kebijakan. Dalam hal ini, kebijakan yang diambil oleh pemerintah adalah pengalokasian dana ataupun bahan-bahan bangunan untuk pembangunan rumah layak huni dengan target sasaran adalah masyarakat kurang mampu dan masyarakat berpenghasilan rendah, ataupun penyandang disabilitas yang memenuhi kriteria sebagai target sasaran.

2.1.4. Proses Kebijakan Publik

Proses kebijakan publik adalah sebuah proses kebijakan yang didalamnya meliputi kegiatan perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan. ahap-tahap kebijakan publik menurut William Dunn sebagaimana dikutip Budi Winarno (2007) adalah sebagai berikut :

a. Penyusunan agenda (*Agenda Setting*)

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kabijakan. Pada tahap ini mungkin suatu masalah tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.

b. Formulasi kebijakan (*Policy Formulating*)

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (*policy alternatives/policy options*) yang ada. Dalam perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing

untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Dalam tahap ini masing-masing actor akan bersaing dan berusaha untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.

c. Adopsi kebijakan (*Policy Adoption*)

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau putusan pengadilan.

d. Implementasi kebijakan (*Policy Implementation*)

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit jika program tersebut tidak diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administratif yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (implementor), namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

e. Evaluasi kebijakan (*Policy Evaluation*)

Dalam tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan, yaitu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik yang telah dilaksanakan sudah mencapai dampak atau tujuan yang diinginkan atau belum.

2.1.5. Program BAPERLAHU Sebagai Kebijakan Publik

Telah dijelaskan bahwa kebijakan publik merupakan pilihan ataupun keputusan yang dibuat oleh pemerintah berupa tindakan-tindakan pemerintah baik untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu karena tujuan tertentu demi kepentingan masyarakat. Pada saat ini, permasalahan sosial yang terjadi ditengah-tengah masyarakat, yakni masalah kemiskinan. Kemiskinan dianggap sebagai permasalahan publik karena merupakan masalah global yang makin berkembang ditengah-tengah masyarakat. Rata-rata, penduduk yang termasuk kategori ini memiliki permasalahan didalam perumahan dan permukiman yang cenderung kumuh dan memiliki lingkungan yang tidak sehat. Untuk menyikapi hal tersebut, pemerintah memiliki hak untuk mengambil kebijakan. Adapun kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi permasalahan yang timbul ditengah-tengah masyarakat ini, yaitu

dengan memberikan bantuan stimulan perumahan swadaya, yang mana penerimanya adalah masyarakat miskin yang memiliki penghasilan rendah dan tidak memiliki rumah hunian yang layak untuk ditinggali.

Setiap kebijakan publik memiliki payung hukum yang mengayomi dan peraturan perundang-undangan adalah pedomannya. Adapun peraturan yang menjadi dasar dalam kebijakan ini adalah sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2016 Tentang Perumahan Swadaya dan juga Peraturan Bupati Mesuji No.39 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni di Kabupaten Mesuji.

2.2. Program Bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni oleh Pemerintah

2.2.1. Pengertian Program

Program adalah kegiatan atau aktivitas yang dirancang untuk melaksanakan kebijakan dan dilaksanakan untuk waktu yang tidak terbatas. Menurut Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, menyatakan bahwa program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintahan atau lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta

memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Menurut pengertian secara umum, Arikunto (2004) mendefinisikan bahwa program merupakan sebuah rencana. Apabila program ini langsung dikaitkan dengan evaluasi program maka program dapat diartikan sebagai suatu unit atau kesatuan kegiatan yang merupakan realisasi ataupun implementasi dari suatu kebijakan, berlangsung dalam proses yang berkesinambungan, dan terjadi pada suatu organisasi dan melibatkan sekelompok orang. Menurut Arikunto (2009) ada tiga pengertian penting dan perlu ditekankan dalam menentukan program, yaitu :

- a. Realisasi atau implementasi suatu kebijakan.
- b. Terjadi dalam waktu yang relatif lama-bukan kegiatan tunggal tetapi jamak berkesinambungan.
- c. Terjadi dalam organisasi yang melibatkan sekelompok orang.

2.2.2. Program Bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni (BAPERLAHU)

Berdasarkan pedoman BSPS, serta Peraturan Bupati Mesuji Nomor 39 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Permahan Layak Huni di Kabupaten Mesuji, BAPERLAHU dimaksudkan untuk mendorong dan meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman yang layak dan sehat di

daerah wilayah Pemerintah Kabupaten Mesuji. Bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni (BAPERLAHU) dipandang perlu diberikan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang memiliki kriteria sesuai dengan ketentuan dan persyaratan pemberian pembangunan perumahan layak huni di Kabupaten Mesuji. Dana yang dikeluarkan untuk program Bantuan Pembangunan Perumahan Layak Huni adalah bersumber dari APBN dan APBD Kabupaten Mesuji, dan besaran nilai bantuan ditetapkan dengan keputusan Bupati Mesuji untuk melaksanakan program Bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni (BAPERLAHU) di Kabupaten Mesuji yang akuntabel, tepat sasaran, dan tepat waktu sesuai prosedur atau mekanisme. Adapun tujuan dari adanya Program ini yaitu (1) meningkatkan taraf hidup masyarakat menjadi lebih baik, (2) memberikan tempat tinggal yang layak dan (3) memberikan kehidupan yang layak, hidup bersih dan sehat.

2.3. Evaluasi Kebijakan Publik

2.3.1. Pengertian Evaluasi

Evaluasi merupakan suatu penilaian terhadap suatu aktivitas pelaksanaan suatu kebijakan ataupun suatu program yang dilakukan untuk mengukur dan menentukan sejauh mana hasil-hasil kebijakan yang dicapai, seperti jumlah target yang telah ditentukan., kelompok sasaran yang dituju, instrumen

kinerja, ataupun dampak-dampak yang terjadi dalam pelaksanaannya. Tujuan evaluasi itu sendiri adalah untuk memperbaiki sistem yang kurang baik dan tidak sesuai dalam pelaksanaan program, baik sumber daya manusianya ataupun sumber daya insfrastruktur. Ada beberapa definisi evaluasi menurut beberapa ahli yakni sebagai berikut :

- a. Arikunto (2009) memberikan definisi tentang evaluasi yakni kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil sebuah keputusan.
- b. Dunn (2003) mengungkapkan bahwa istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai hasil terhadap hasil kebijakan dan program.
- c. Hanafi & Guntur dalam Hayat (2008) mengemukakan bahwa evaluasi merupakan penilaian terhadap suatu persoalan yang umumnya menunjukkan baik dan buruknya persoalan tersebut. Dalam kaitannya dengan suatu program biasanya evaluasi dilakukan dalam rangka mengukur efek sesuatu program dalam mencapai tujuan yang ditetapkan.

Berdasarkan beberapa definisi di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya evaluasi merupakan penilaian terhadap suatu hal untuk mengukur berhasil atau tidaknya suatu kegiatan atau kebijakan yang sudah dibuat yang

digunakan untuk melihat sejauh mana tercapainya keberhasilan guna untuk mengambil sebuah keputusan.

2.3.2. Langkah-langkah Evaluasi

Suchman dalam Hayat (2008) mengemukakan enam langkah dalam melaksanakan kegiatan evaluasi, yaitu sebagai berikut :

- a. Mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi.

Langkah pertama yang harus dilakukan dalam mengevaluasi yakni melakukan proses indentifikasi untuk mengukur/ menilai apakah suatu kegiatan atau program yang dilaksanakan sudah sesuai dengan tujuan awal diadakan program tersebut.

- b. Analisis terhadap masalah.

Langkah kedua dalam evaluasi yaitu analisis terhadap masalah. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengetahui apa saja kesulitan seseorang/kelompok pelaksana program dalam pelaksanaan kegiatannya sehingga dapat didiagnosis dan diberikan solusi dan perbaikan atas permasalahan tersebut.

- c. Deskripsi dan standarisasi kegiatan.

Dalam hali ini, evaluator perlu untuk menjabarkan informasi terkait kegiatan atau program yang akan di evaluasi baik itu standarisasi program ataupun regulasinya.

- d. Pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi
Langkah selanjutnya dalam evaluasi yakni mengukur tingkat perubahan yang terjadi selama program tersebut berlangsung. Apakah program bersifat positif atau justru negatif dalam mengatasi permasalahan.
- e. Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau karena penyebab lain
Apabila ada perubahan baik bersifat positif ataupun bersifat negative dalam pelaksanaan program kebijakan tersebut, maka perlu ditinjau penyebab terjadinya perubahan, baik itu dalam konteks ekonomi, sosial, budaya, ataupun nilai-nilai lainnya.
- f. Beberapa indikator untuk menemukan keberadaan suatu dampak.
Langkah akhir yang digunakan untuk mengevaluasi adalah menentukan indikator-indikator. Dalam penelitian ini, indikator yang digunakan untuk menentukan keberadaan suatu dampak yakni indikator input, indikator proses, indikator output, dan indikator dampak.

2.3.3. Evaluasi Program

Program adalah kegiatan atau aktivitas yang dirancang untuk melaksanakan kebijakan dan dilaksanakan untuk waktu yang tidak terbatas. Kebijakan

bersifat umum dan untuk merealisasikan kebijakan disusun berbagai jenis program. Semua program tersebut perlu dievaluasi untuk menentukan apakah layanan atau intervensinya telah mencapai tujuan yang ditetapkan. Evaluasi program adalah metode sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan memakai informasi untuk menjawab pertanyaan dasar mengenai program.

Manfaat dari pelaksanaan evaluasi program adalah untuk mengetahui seberapa tinggi sebuah kebijakan itu terlaksana. Hasil dari evaluasi program ini adalah untuk mengambil keputusan dan kebijakan dari program yang tengah dijalankan. Wujud dari hasil evaluasi program inilah yang kelak akan menjadi sebuah rekomendasi dari evaluator untuk mengambil keputusan. Menurut Arikunto (2009) ada empat kemungkinan kebijakan yang dapat dilakukan dari hasil pelaksanaan sebuah program keputusan, yaitu :

- a. Menghentikan program, karena dipandang program tersebut tidak ada manfaatnya, atau tidak dapat terlaksana sebagaimana yang diharapkan.
- b. Merevisi program, karena ada bagian-bagian yang kurang sesuai dengan harapan.
- c. Melanjutkan program, karena pelaksanaan program menunjukkan bahwa segala sesuatu sudah berjalan sesuai dengan harapan dan memberikan hasil yang bermanfaat.

- d. Menyebarluaskan program, karena program tersebut telah berhasil dan berjalan baik maka sangat baik lagi jika diadakan ditempat atau waktu lain.

Evaluasi program dapat dikelompokkan menjadi evaluasi proses (*process evaluation*), evaluasi manfaat (*outcome evaluation*) dan evaluasi akibat (*impact evaluation*). Evaluasi program merupakan suatu unit satu kesatuan suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengumpulkan macam-macam informasi implementasi atau pelaksanaan suatu kebijakan. Evaluasi program bertujuan untuk mengetahui pencapaian tujuan program yang telah dilaksanakan. Selanjutnya, hasil evaluasi program tersebut digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan tindak lanjut dalam mengambil keputusan berikutnya.

2.3.4. Tujuan Evaluasi Program

Tujuan dari diadakannya evaluasi program adalah untuk mengetahui pencapaian tujuan program dengan langkah mengetahui keterlaksanaan kegiatan program, karena evaluator program ingin mengetahui bagian mana dari komponen dan subkomponen program yang belum terlaksana dan apa sebabnya. Arikunto (2009) menjelaskan tentang tujuan evaluasi program yang terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus, yakni sebagai berikut :

a. Tujuan Umum

Tujuan penelitian evaluatif atau tujuan evaluasi program adalah ingin mengetahui seberapa efektif program yang sudah dilaksanakan. Dalam hal ini, peneliti ingin mengetahui seberapa efektif program bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni (BAPERLAHU) yang ada di Kabupaten Mesuji.

b. Tujuan Khusus

Tujuan khusus penelitian adalah ingin mengetahui seberapa tinggi kinerja masing-masing komponen sebagai faktor penting yang mendukung kelancaran proses dan pencapaian tujuan.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya evaluasi program memiliki tujuan untuk mengukur sejauh mana kegiatan implementasi program tersebut berjalan. Dengan adanya evaluasi program, maka evaluator dapat menilai tingkat keberhasilan suatu program yang nantinya akan digunakan sebagai bahan penilaian, perbaikan, ataupun pengambilan keputusan.

2.3.5. Indikator Keberhasilan Program

Indikator keberhasilan program adalah ukuran yang digunakan untuk menilai apakah program yang dirumuskan berhasil atau tidak. Apabila indikator telah

dicapai maka program dikatakan berhasil, dan sebaliknya apabila indikator tidak tercapai maka dapat dikatakan bahwa program tersebut belum bisa dikatakan berhasil. Indikator keberhasilan dapat dilihat dari proses ataupun hasil akhir. Adapun indikator dalam evaluasi program pembangunan rumah layak huni adalah menjadikan rumah yang tidak layak huni menjadi layak huni, meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR) dan meningkatkan peran masyarakat dalam gotong royong. Menurut Kaufman dan Thomas dalam Arikunto (2009) membedakan model evaluasi menjadi delapan, yaitu:

- a. *Goal Oriented Evaluation Model*, dikembangkan oleh Tyler.
- b. *Goal Free Evaluation Model*, dikembangkan oleh Scriven.
- c. *Formatif Summatif Evaluation Model*, dikembangkan oleh Michael Scriven.
- d. *Countenance Evaluation Model*, dikembangkan oleh Stake.
- e. *Responsive Evaluation Model*, dikembangkan oleh Stake.
- f. *CSE-UCLA Evaluation Model*, menekankan pada “kapan” evaluasi dilakukan.
- g. *CIPP Evaluation Model*, dikembangkan oleh Stufflebeam.
- h. *Discrepancy Model*, dikembangkan oleh Provus.

Pemilihan model evaluasi yang akan digunakan tergantung pada tujuan evaluasi. Dalam pelaksanaan evaluasi program pembelajaran keterampilan digunakan pendekatan system. Pendekatan system adalah pendekatan yang

dilaksanakan dalam mencakup seluruh proses pendidikan yang dilaksanakan. Soedjono (2005) menjelaskan bahwa fokus utama evaluasi diarahkan kepada keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dan dampak (*impact*) dari pelaksanaan rencana. Oleh karena itu, dalam perencanaan yang transparan dan akuntabel, harus disertai dengan penyusunan indikator kinerja pelaksanaan rencana, yang sekurang-kurangnya indikator masukan, indikator keluaran, dan indikator hasil.

Secara umum, evaluasi sebagai suatu tindakan atau proses setidaknya memiliki tiga macam fungsi pokok, yaitu (1) Mengukur kemajuan, (2) Menunjang penyusunan rencana, (3) Memperbaiki atau melakukan penyempurnaan kembali. Sedangkan menurut Akdon (2007) tingkat keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi dan masukan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Keuntungan dari evaluasi bermanfaat untuk perbaikan perencanaan, strategi, kebijakan; untuk pengambilan keputusan; untuk tujuan pengendalian program/kegiatan; untuk perbaikan input, proses, dan output, perbaikan tatanan atau sistem prosedur. Pada penelitian ini, untuk menilai tingkat keberhasilan dari program Bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni (BAPERLAHU), peneliti menggunakan skema umum penilaian evaluasi menurut Nurcholis (2007) yang terdiri dari *input, process, output* dan *outcome*. Adapun penjelasannya sebagai berikut :

Tabel 3. Skema Umum Penilaian Evaluasi

<p>Input/masukan Masukan yang diperlukan untuk pelaksanaan kebijakan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Sumber daya pendukung (SDM,uang, sarana/prasarana) 2) Bahan-bahan dasar pendukung (peralatan,teknologi)
<p>Proses Yakni bagaimana sebuah kebijakan ditransformasikan dalam bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tepat sasaran atau tidak 2) Tepat guna atau tidak 3) Efisien atau tidak
<p>Output/hasil Sesuatu yang diharapkan langsung dicapai darisuatu kegiatan baik berupa fisik/non fisik sesuai tujuan yang telah ditetapkan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tepat tidak sasaran yang dituju 2) Berapa besar sasaran yang tercover 3) Seberapa banyak kelompok sasaran yang tertangani 4) Seberapa banyak kelompok sasaran yang terlibat
<p>Outcome/dampak Segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya output/ keluaran hasil nyata yang diperoleh setelah adanya output/keluaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Ada atau tidak perubahan pada target sasaran 2) Seberapa besar perubahan kelompok sasaran 3) Seberapa signifikan perubahan yang terjadi pada kelompok sasaran dibandingkan tujuan yang ingin dicapai.

(Sumber : Nurcholis (2007))

- a. *Input* adalah masukan yang diperlukan untuk pelaksanaan kebijakan dengan meninjau sumber daya sehingga dapat menganalisis apakah alokasi sumberdaya yang ada sudah sesuai dengan rencana stratejik yang ditetapkan. Adapun tinjauan kesesuaian *input* menurut Paramitha (2015) memiliki indikator tersendiri didalamnya yang terdiri dari kesesuaian anggaran, bentuk program optimal, seluruh instrument mendampingi serta kecukupan biaya, dan proses pencapaian tujuan.

- b. *Process* adalah bagaimana sebuah kebijakan ditransformasikan dalam bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat. Untuk itu dikembangkan instrument yang meliputi indikatornya, yakni ketepatan sasaran, ketepatangunaan, dan efisiensi. *Process* menekankan kepada efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program BAPERLAHU. Menurut Ravianto (2014) efektivitas ialah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang akan menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Sedangkan Efisiensi menurut Kamus Besar Ekonomi (2003) yakni ketepatan cara (usaha,kerja) dalam menjalankan sesuatu dengan tidak membuang-buang waktu, tenaga dan biaya. Dalam hal ini efektivitas dan efisiensinya menekankan pada pelaksanaan yang sesuai dengan target sasaran yang ditetapkan dengan anggaran yang juga tepat pada penggunaannya.
- c. *Output* adalah hasil dari pelaksanaan kebijakan dengan membandingkan keluaran dapat dianalisis apakah kegiatan yang terlaksana sudahkah sesuai dengan rencana. Indikator keluaran menjadi landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila tolak ukur dikaitkan dengan sasaran kegiatan yang terdefinisi dengan baik dan terukur. Untuk itu dikembangkan instrument yang meliputi indikatornya, yaitu efektivitas, presentase besar sasaran yang tercover dan berhasil ditangani, serta pemberdayaan keswadayaan masyarakat. Adapun dalam pelaksanaannya, penilaian terdiri dari capaian hasil

pelaksanaan program pembangunan rumah layak huni, pelestarian nilai gotong royong, dan banyaknya jumlah RTLH (Paramitha, 2015).

- d. *Outcome* yaitu berkenaan dengan apakah suatu pelaksanaan kebijakan berdampak nyata terhadap kelompok sasaran dengan tujuan kebijakan. Outcome menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil yang lebih tinggi yang mungkin menyangkut kepentingan banyak pihak. Dengan indikator *outcome*, instansi dapat mengetahui apakah hasil yang diperoleh memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat.

Skema umum penilaian menurut Nurcholis ini merupakan penilaian secara menyeluruh terhadap suatu kebijakan. Penilaian tersebut meliputi masukan awal yang dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu kebijakan, proses pelaksanaan kebijakan, hasil kebijakan hingga kesesuaian antar tujuan kebijakan dengan dampak yang ditimbulkan. Maka dengan menggunakan teori evaluasi kebijakan ini dapat dibuat penilaian secara menyeluruh terhadap hasil kebijakan yang akan di evaluasi.

2.4. Status Sosial Ekonomi

Status sosial ekonomi merupakan tingkatan tinggi rendahnya prestise yang dimiliki seseorang dalam kedudukannya di masyarakat berdasarkan pada kepemilikan materi ataupun sesuatu lainnya yang dapat menunjukkan status sosial yang dimiliki orang tersebut. Menurut Soekanto (2001) menyatakan bahwa komponen pokok kedudukan sosial ekonomi meliputi ukuran kekayaan, ukuran kekuasaan, ukuran kehormatan, dan ukuran ilmu pengetahuan. Status sosial ekonomi di dalam masyarakat merupakan dampak dari adanya stratifikasi sosial. Dampak lainnya adalah turut munculnya peran sosial dalam masyarakat, karena keduanya merupakan dua hal yang saling beriringan, semakin tinggi status sosial, makin tinggi pula peran sosial seseorang dalam bermasyarakat.

Secara umum, faktor-faktor yang mempengaruhi status sosial ekonomi dalam masyarakat dapat dilihat dari beberapa faktor yang mempengaruhinya, yaitu mempengaruhinya, yaitu pekerjaan, pendidikan, pendapatan, jumlah tanggungan orang tua, kepemilikan dan tempat tinggal. Sedangkan menurut Soekanto (2007) status sosial ekonomi meliputi ukuran kekayaan, ukuran kekuasaan, ukuran kehormatan, dan ukuran ilmu pengetahuan.

2.4.1 Tingkatan Status Sosial Ekonomi

Menurut Sunarto (2004), terdapat tiga tingkatan status sosial ekonomi di masyarakat, yaitu:

a. Kelas atas (*upper class*)

Kelas atas adalah suatu golongan keluarga atau kehidupan rumah tangga yang serba kecukupan dalam segala hal baik itu kebutuhan primer, sekunder maupun tersiernya. Pada kelas ini segala kebutuhan hidup dapat terpenuhi dengan mudah. Atau dapat dikatakan mempunyai kemampuan ekonomi yang melebihi kebutuhan hidupnya dari harta kekayaan yang lebih banyak.

b. Kelas menengah (*middle class*)

Kelas menengah merupakan golongan yang mempunyai kemampuan di bawah tinggi dan di atas rendah atau dengan kata lain adalah orang yang dalam kehidupannya tidak berlebihan akan tetapi selalu cukup dalam memenuhi kebutuhannya disesuaikan dengan kemampuan.

c. Kelas bawah (*lower class*)

Kelas bawah merupakan golongan yang memperoleh pendapatan atau penerimaan sebagai imbalan terhadap kerja mereka yang jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan kebutuhan pokoknya. Mereka yang termasuk dalam kategori ini adalah sebagai orang miskin dan termasuk

dalam golongan yang berpenghasilan rendah, yakni golongan yang mendapatkan penghasilan lebih rendah jika dibandingkan dengan kebutuhan minimal yang seharusnya mereka penuhi. Penghasilan yang dimaksud adalah penerimaan yang berupa uang atau barang baik dari pihak lain maupun dari hasil sendiri dengan jalan dinilai memberi uang yang berlaku pada saat itu

2.5. Perumahan dan Permukiman

2.5.1. Pengertian Rumah dan Permukiman

Menurut UU No.4 Tahun 1992 Tentang perumahan dan permukiman, Rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga. Selain itu rumah juga merupakan tempat seseorang berproses, bertumbuh, dan beraktivitas serta memperoleh norma untuk melangsungkan kehidupannya di dalam masyarakat. Adapun yang dimaksud perumahan yakni suatu bangunan, tempat tinggal manusia dalam melangsungkan kehidupannya, sebagai wadah kehidupan manusia yang menyangkut aspek sosial, ekonomi, dan budaya dari penghuninya. Sedangkan permukiman adalah lingkungan hidup yang berupa kawasan perdesaan ataupun perkotaan yang berfungsi sebagai lingkungan hunian dan lingkungan tempat tinggal masyarakat dalam kehidupannya. Menurut UU No.1 Tahun

2011 permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan.

2.5.2. Permasalahan Perumahan dan Permukiman di Indonesia

Secara umum, permasalahan pada bidang perumahan dan kawasan permukiman di Indonesia pada saat ini adalah sebagai berikut ;

- a. Secara umum sistem penyelenggaraan dan pelayanan pada bidang perumahan baik di tingkat pusat maupun daerah masih belum optimal.
- b. Tidak efisiennya pasar perumahan, seperti proses perijinan yang rumit, perijinan pembangunan yang masih relatif mahal, belum adanya standarisasi KPR, serta penilaian kredit atas dokumen lainnya.
- c. Tingginya tingkat kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau, namun masih belum dapat diimbangi karena minimnya kemampuan penyedia baik oleh masyarakat itu sendiri, pengusaha, ataupun pemerintah.
- d. Ketidakmampuan masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah dalam memenuhi rumah yang layak, sehat dan aman karena minimnya kemampuan ekonomi.

- e. Masih banyaknya ditemui kawasan perumahan dan permukiman di suatu daerah yang secara visual terlihat kumuh dan tidak teratur.

3. METODE PENELITIAN

3.1. Tipe Penelitian

Penelitian ini tergolong pada tipe penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengungkapkan data-data yang telah dihimpun yang berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka yang didapat dari fenomena lapangan yang bersifat empiris guna menggambarkan dan menafsirkan hasil penelitian. Moleong (2017), menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain – lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alami dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian ini berupaya menggambarkan kejadian atau fenomena sesuai dengan apa yang terjadi dilapangan. Pendekatan deskriptif menurut Creswell dalam Novita (2013) ialah untuk melihat, mendeskripsikan, dan

memperoleh pemahaman tentang bagaimana hasil kejadian di lapangan. Peneliti menggunakan tipe penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan, mengevaluasi dan menganalisis mengenai pelaksanaan program pembangunan yang diadakan Pemerintah Kabupaten Mesuji dalam Wadah Program Bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni (BAPERLAHU).

3.2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan hal utama dalam sebuah penelitian. Dengan bimbingan dan arahan suatu fokus, seorang peneliti tahu persis data mana dan data tentang apa yang perlu dikumpulkan. Menurut Moleong (2017), dengan penetapan fokus yang jelas dan mantap, seorang peneliti dapat membuat keputusan yang tepat tentang data mana yang dikumpulkan dan mana yang tidak perlu dijamah ataupun mana yang akan dibuang. Untuk membatasi pembahasan dalam penelitian ini maka diperuntukkan sebuah fokus penelitian agar pembahasan tetap terpusat pada tujuan penelitian yang sedang dilakukan.

Fokus utama pada penelitian evaluasi pelaksanaan program bantuan pembangunan rumah layak huni (BAPERLAHU) di Kabupaten Mesuji tahun 2019 yakni pada hasil akhir dari pelaksanaan program untuk mengetahui

apakah program telah berhasil dan tepat sasaran sesuai dengan rancangan kebijakan awal. Sedangkan ruang lingkup penelitian ini yakni sebagai berikut

1. Evaluasi pelaksanaan program
 - a. *Input* (masukan)
 - b. *Process* (proses)
 - c. *Output* (hasil)
 - d. *Outcome* (dampak)
2. Kelompok sasaran
 - a. Kelompok sasaran yang ter-*cover*.
 - b. Kesesuaian kelompok sasaran.
3. Kontribusi masyarakat penerima bantuan.

3.3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat penelitian ini dilakukan agar peneliti dapat mengetahui bagaimana keadaan yang sebenarnya terhadap apa yang hendak diteliti. Dalam penelitian ini, lokasi yang dipilih untuk penelitian adalah Kabupaten Mesuji yang bertepatan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Mesuji. Adapun pertimbangan dalam pemilihan lokasi adalah dikarenakan Kabupaten Mesuji merupakan salah satu daerah yang melaksanakan dan menerapkan program pembangunan rumah swadaya berupa program Bantuan Rumah Layak Huni (BAPERLAHU) yang tersebar luas di setiap desanya.

3.4. Jenis dan Sumber Data

3.4.1. Jenis Data

Jenis data merupakan bagian yang sangat penting dari metode penelitian kualitatif dimana jenis data merupakan kata-kata dan data-data sebagai penambahan dalam menambah data. Jenis data dibedakan menjadi dua yaitu jenis data primer dan jenis data skunder.

a. Data primer

Data primer adalah segala informasi atau hal-hal yang berkaitan langsung dengan konsep penelitian yang didapatkan secara langsung dari objek penelitian atau informan. Data primer merupakan hasil jawaban langsung dari informan. Peneliti menggunakan data primer yang berasal dari pelaksanaan penelitian lapangan berupa wawancara baik terstruktur maupun mendalam, serta observasi langsung oleh peneliti. Data primer ini merupakan unit analisis utama yang digunakan dalam kegiatan analisis data. Data primer diperoleh oleh peneliti sebagai hasil dari proses wawancara mendalam dan observasi mengenai program Bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni (BAPERLAHU) yang ada di Kabupaten Mesuji.

b. Data skunder

Data skunder adalah data tambahan yang didapatkan dari berbagai sumber yang terkait dengan penelitian ini, baik dengan cara membaca, mengutip, ataupun mempelajari dan menelaah peraturan kebijakan. Dalam penelitian ini, yang menjadi jenis data skunder adalah artikel, jurnal, serta situs internet yang berkaitan dengan program Bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni (BAPERLAHU) yang ada di Kabupaten Mesuji.

3.4.2. Sumber Data

Sumber data sendiri merupakan bagian yang sangat penting pada suatu penelitian. Menurut Lofland dan Lofland dalam Moleong (2011) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen, dan lain-lain. Sumber data tersebut dicatat melalui catatan tertulis perekmana, pengambilan foto dan video. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Informan

Informan merupakan orang-orang yang berhubungan dan memiliki informasi tentang penerapan program Bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni (BAPERLAHU) pada Kabupaten Mesuji tahun 2019. Informan ini dijadikan sebagai sumber data yang penting dalam

menyusun penelitian ini. Dibawah ini merupakan tabel informan peneliti, yakni sebagai berikut :

Tabel 4. Data Informan Penelitian

No.	Nama	Jabatan/KPB	Informasi yang diperoleh	Tanggal Wawancara
1.	Sugih Wibowo, S.T	Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Mesuji	Gambaran umum BAPERLAHU	23/03/2020
2.	Andre Al Rendra, S.Pi	Kabid Perumahan dan Bangunan Gedung Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Mesuji	Sistem pelaksanaan program BAPERLAHU dan pelaksanaan teknis di lapangan	23/03/2020
3.	Murwanto, S.E	Kasi Sarana dan Prasarana Umum Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Mesuji	Data penerima bantuan program BAPERLAHU kabupaten Mesuji Tahun 2019	23/03/2020
4.	Ika Purnama Sari, S.Si	Plt. Kasubag Perencanaan dan Keuangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Mesuji	Data APBN dan APBD perumahan swadaya Kabupaten Mesuji	24/03/2020
5.	Rismawati	Kelompok Penerima Bantuan (KPB) Kec. Mesuji	Informasi BAPERLAHU Desa Wiralaga	03/12/2019
6.	Bania	Kelompok Penerima Bantuan (KPB) Kec. Mesuji	Implementasi BAPERLAHU Desa Wiralaga	03/12/2019

7.	Persi Morispen	Kelompok Penerima Bantuan (KPB) Kec. Simpang Pematang	Proses pembangunan BAPERLAHU Desa Sp.Mesuji	20/01/2020
8.	Ali Napiah	Kelompok Penerima Bantuan (KPB) Kec. Simpang Pematang	Dokumentasi pembangunan BAPERLAHU	09/07/2020
9.	Jelin	Kelompok Penerima Bantuan (KPB) Kec. Mesuji	Dokumentasi contoh hasil bangunan BAPERLAHU	23/03/2020
10.	Karni	Kelompok Penerima Bantuan (KPB) Kec. Mesuji	Dokumentasi contoh hasil bangunan BAPERLAHU	23/03/2020
11.	Deden Cahyo	TPM BAPERLAHU 2017	Tatalaksana BAPERLAHU	15/07/2020

(Sumber : Diolah oleh peneliti, 2020)

b. Dokumen-dokumen

Dokumen adalah arsip yang berkaitan dengan program pelaksanaan Bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni (BAPERLAHU) Kabupaten Mesuji. Adapun dokumen-dokumen yang dapat dijadikan informasi pada penelitian ini yaitu diantaranya adalah :

- 1) Peraturan Bupati No.39 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni di Kabupaten Mesuji
- 2) Data Verifikasi Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Mesuji tahun 2017

- 3) APBD dan APBN Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dan BAPERLAHU kabupaten mesuji tahun 2013-2019
- 4) Profil Kabupaten Mesuji
- 5) Profil Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Mesuji.
- 6) Data penerima bantuan program BAPERLAHU kabupaten Mesuji Tahun 2019

3.5. Instrumen Penelitian

Adapun pada sebuah penelitian salah satu hal yang sangat penting dalam menemukan sebuah data adalah instrument penelitian, dimana instrument data merupakan merupakan bagian yang paling berpengaruh dari keberhasilan dan mendapatkan data. Sugiyono (2012) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif instrument utamanya adalah peneliti itu sendiri, namun selanjutnya setelah fokus penelitian menjadi jelas, maka kemungkinan akan dikembangkan instrument penelitian sederhana, yang diharapkan dapat melengkapi data dan membandingkan dengan data yang telah ditemukan melalui observasi dan wawancara. Dalam penelitian ini, peneliti terjun langsung ke lapangan sendiri dengan mengumpulkan data, menganalisis dan membuat kesimpulan dengan menggunakan pedoman wawancara, pedoman pengamatan, dan pencermatan dokumen, *recording*, dan catatan-catatan (*Field Note*).

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Lofland dalam Moleong (2011) mengatakan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data dibagi ke dalam kata-kata, tindakan, sumber data tertulis, foto, dan lainnya. Data adalah bahan keterangan dalam suatu objek penelitian yang diperoleh. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

3.6.1 Wawancara

Salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan adalah melalui wawancara, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada informan. Dalam memperoleh informasi yang diinginkan, proses pertama yang dilakukan peneliti adalah dengan menentukan terlebih dahulu informan yang akan dimintai informasinya, setelah itu peneliti akan menentukan informan kunci yang memiliki banyak informasi yang berkaitan dengan sasaran penelitian, setelah itu peneliti melakukan wawancara langsung dengan informan yang telah ditentukan. Wawancara yang dilakukan peneliti dilakukan pada jam kerja dinas yaitu pada hari senin sampai dengan hari jum'at. Adapun untuk melengkapi proses wawancara, peneliti menggunakan

instrumen penelitian berupa panduan wawancara, pengamatan wawancara, pencermatan dokumen, dan *recording*.

3.6.2 Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan. Pada dasarnya teknik observasi digunakan untuk melihat atau mengamati perubahan fenomena sosial yang tumbuh dan berkembang yang kemudian dapat dilakukan penilaian atas perubahan tersebut. Bagi pelaksana atau petugas atau disebut sebagai observer bertugas melihat objek dan kepekaan mengungkap serta membaca permasalahan dalam moment-moment tertentu dengan dapat memisahkan antara yang diperlukan dengan yang tidak diperlukan. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen.

Adapun dalam penelitian ini, observasi melibatkan dua komponen yaitu pelaku observasi dan objek observasi. Peneliti melakukan observasi dengan mendeskripsikan program Bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni (BAPERLAHU) di Kabupaten Mesuji. Beberapa observasi yang dilakukan oleh peneliti antara lain :

- a. Melakukan pengamatan terhadap dokumen tentang alur dan prosedur program BAPERLAHU pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- b. Melakukan pengamatan terhadap proses pembangunan BAPERLAHU di lingkungan masyarakat Kelompok Penerima Bantuan (KPB).
- c. Melakukan pengamatan terhadap dokumen bidang informasi dan pengelolaan administrasi yang mendukung proses program BAPERLAHU di Kabupaten Mesuji.

3.6.3 Studi Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang ditunjukkan kepada subjek penelitian dimana data tersebut merupakan catatan peristiwa yang sudah lalu. Dokumentasi yang diketik dapat berupa berbagai macam bentuk, tidak hanya dokumen resmi. Dokumen ini dibedakan menjadi dua dokumen yaitu dokumen primer, bila dokumen itu ditulis oleh pelakunya sendiri dan dokumen sekunder apabila peristiwa yang dialami disampaikan pada orang lain yang kemudian menuliskannya. Dokumen dapat merupakan catatan pribadi, surat pribadi, buku harian, laporan kerja, catatan kasus, rekaman kaset, rekaman video, foto dan sebagainya.

Tabel 5. Daftar Dokumen Penelitian

No.	Dokumen	Isi Dokumen
1.	Peraturan Bupati No.39 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni di Kabupaten Mesuji	Peraturan Bupati No.39 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni di Kabupaten Mesuji disamping berisi tentang segala peraturan dan tata cara pelaksanaan program BAPERLAHU yang menjadi landasan dalam pelaksanaan program ini.
2.	Data Verifikasi Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Mesuji tahun 2017	Dokumen disamping berisi tentang Data Verifikasi Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Mesuji tahun 2017 yang dilakukan oleh tim lapangan untuk melakukan cek kondisi awal sebelum pelaksanaan program, yang mana dalam hal ini digunakan sebagai acuan data penetapan penerima bantuan.
3.	APBD dan APBN Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dan BAPERLAHU kabupaten mesuji tahun 2013-2019	Data disamping berisikan tentang bantuan APBN dan APBD Kabupaten Mesuji sebagai rincian anggaran/dana pelaksanaan program
4.	Profil Kabupaten Mesuji	Data ini berisi tentang Profil Kabupaten Mesuji secara lengkap dan jelas baik itu peta lokasi, sejarah, letak geografis, serta visi dan misi Kabupaten Mesuji
5.	Profil Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Mesuji	Profil Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Mesuji berisi tentang lokasi, tugas pokok dan fungsi, susunan organisasi, serta daftar pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Mesuji
6.	Daftar penerima BAPERLAHU 2019	Berisikan tentang daftar nama penerima bantuan, lokasi kecamatan/desa, alamat penerima serta besaran biaya yang diterima tiap individu

(Sumber : Diolah oleh peneliti, 2020)

3.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, menyimpulkannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Dalam penelitian kualitatif, tahapan analisis data meliputi antara lain :

3.7.1 Reduksi Data (*Data Reduction*)

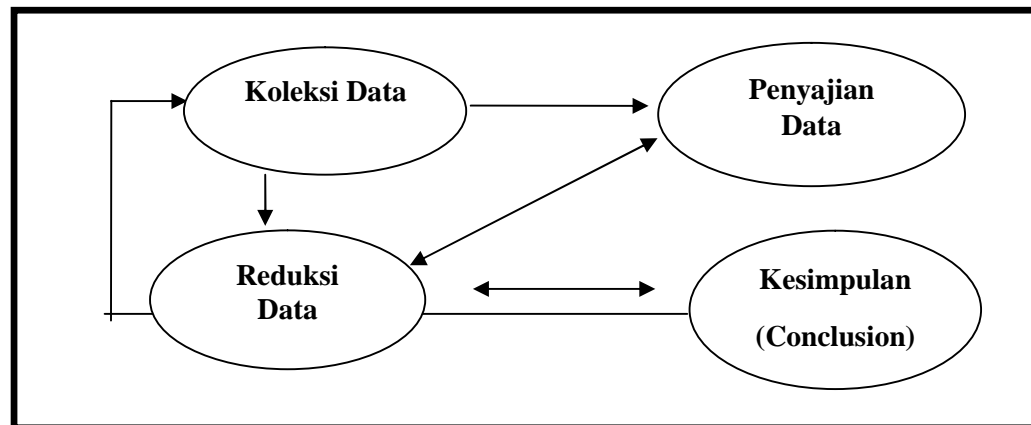
Diartikan sebagai proses pemilihan, pemisahan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan reduksi data dengan cara data yang diperoleh dari lokasi penelitian kemudian akan dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terinci. Laporan lapangan selanjutnya dirangkum, dipilih hal-hal pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting untuk menjawab permasalahan dalam penelitian.

3.7.2 Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian dilakukan untuk memudahkan bagi peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. Penyajian data dibatasi sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian ini penyajian data diwujudkan dalam bentuk uraian, tabel, gambar atau foto, bagan dan sejenisnya untuk menjelaskan tentang program Bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni (BAPERLAHU) di Kabupaten Mesuji.

3.7.3 Penarikan Kesimpulan (*Concluting Drawing*)

Penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat bersifat sementara apabila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Tetapi apabila bukti yang dikemukakan terbukti valid dan konsisten maka kesimpulan yang ditarik merupakan kesimpulan akhir. Dalam penelitian ini penarikan kesimpulan dilakukan dengan pengambilan intisari dari rangkaian kategori hasil penelitian berdasarkan observasi, wawancara serta dokumentasi hasil penelitian. Adapun bagian teknik analisis data berdasarkan model komponen analisis data dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 1. Komponen Dalam Analisis Data
 (Sumber : Sugiyono, 2017)

3.8 . Teknik Keabsahan Data

Teknik terakhir dalam penelitian ini adalah teknik keabsahan data. Menurut Sugiyono (2017) teknik keabsahan data dalam penelitian kualitatif merupakan standar validitas yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi

3.8.1 Uji Kredibilitas (*Credibility*)

Pada dasarnya derajat kepercayaan (kredibilitas) menggantikan konsep validitas internal dari nonkualitatif. Kriteria ini berfungsi pertama, melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai; kedua, mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan

ganda yang sedang diteliti. Kegiatan- kegiatan yang dilakukan oleh peneliti untuk memeriksa kredibilitas atau derajat kepercayaan yaitu :

a. Triangulasi

Uji kredibilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode triangulasi. Menurut Moleong dalam Munawaroh (2016), triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Triangulasi digunakan dengan cara membandingkan hasil wawancara dengan kejadian sebenarnya dan ditambah dokumentasi. Data yang peneliti dapat dari informan dikomplikasikan dengan hasil dokumentasi dan observasi yang memiliki kesamaan informasi kemudian dikategorikan mana pandangan yang sama, berbeda, dan spesifik. Adapun dalam penelitian ini, informasi wawancara, observasi, dan dokumentasi berasal dari pihak Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Mesuji yang merupakan implementer pelaksanaan program Bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni (BAPERLAHU) dan juga Kelompok Penerima Bantuan (KPB) serta Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM). Contoh dari proses yang dilakukan peneliti ini dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

Tabel. Contoh Triangulasi

Topik : Ketepatan pelaksanaan program BAPERLAHU di Kabupaten Mesuji Tahun 2019

No.	Informan	Wawancara	Dokumentasi
1.	Andre Alrendra	<p>Dalam menjalankan program Bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni (BAPERLAHU) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Mesuji akan melakukan pembahasan-pembahasan mengenai kebijakan teknis, peraturan-peraturan ataupun perkembangan program. Saat di Lapangan, Dinas di bantu oleh Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) disini memiliki peran yang cukup penting, mereka ditugaskan untuk melakukan verifikasi ulang seperti untuk mengecek nama yang sudah terdaftar, apakah sudah sesuai dengan ketentuan.</p> <p>Proses bentuk pencairan dana yakni melalui non-tunai yang ditransfer dari rekening kas daerah ke rekening masing-masing Kelompok Penerima Bantuan (KPB). Masing-masing Kelompok Penerima Bantuan (KPB) membuat rekening untuk penyaluran dana melalui bank yang ditunjuk. Dalam hal ini bank yang ditunjuk adalah Bank BRI atau Bank Lampung. Pemberian dana mengikuti prosedur yakni melalui beberapa tahapan. Dalam hal ini kami ada tiga tahapan, yakni tahap pertama pemberian bantuan 40%, tahap kedua 30%, tahap ketiga 30%. Begitu material</p>	<p>1 Peraturan Bupati No.39 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni di Kabupaten Mesuji.</p> <p>2. APBD BAPERLAHU kabupaten mesuji tahun 2019</p>

		dikirim, kita cairkan sebesar 40% non tunai dari rekening KPB ke rekening toko. Jadi tidak melibatkan uang secara fisik. lalu mereka membangun rumahnya sendiri hingga progres menjadi 70% dan kembali melakukan pembayaran hingga akhirnya pembangunan menjadi 100%. Semua pencairan itu melalui rekomendasi dinas sehingga akhirnya selesai.	
2.	Deden Cahyo	TPM biasanya perkecamatan ada dua orang, <i>jadi</i> , nantinya dia yang akan mendampingi desa yang mendapatkan bantuan tersebut.	
3.	Rismawati	memang benar pemberian bantuannya itu tidak sekaligus, semuanya bertahap, pertama diturunkan pasir sama semen, terus tambahan bata dan nanti dikasih lagi tambahan buat atap sama keperluan lain yang dipakai	

Kesimpulan : Program BAPERLAHU merupakan sebuah kebijakan yang sistematis dan tersusun, yang mana didalamnya terdapat SDM yang saling keterkaitan dalam pelaksanaan program baik dalam perancangan maupun saat pelaksanaan di lapangan. Adapun setiap rancangan dan pembagian tupoksinya beracuan pada Peraturan Bupati No.39 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni di Kabupaten Mesuji

b. Perpanjangan Keikutsertaan Penelitian

Penelitian ini memerlukan perpanjangan keikutsertaan peneliti dengan waktu yang cukup panjang yaitu dari bulan Agustus 2019 sampai bulan Februari 2020 guna untuk mendeteksi dan memperhitungkan hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan data dalam penulisan hasil penelitian ini.

3.8.2 Uji Keteralihan (*Transferability*)

Dalam kriteria ini dilakukan menggunakan “uraian rinci”, yaitu dengan melaporkan hasil penelitian seteliti dan secermat mungkin yang menggambarkan konteks tempat penelitian diselenggarakan. Derajat keteralihan dapat dicapai lewat uraian yang cermat, rinci, tebal, atau mendalam serta adanya kesamaan konteks antara pengirim dan penerima. Upaya untuk memenuhi hal tersebut, peneliti melakukannya melalui triangulasi sumber serta disajikan dalam hasil pembahasan.

Menurut Patton *dalam* Moleong (2017) triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Untuk melakukan keteralihan, peneliti berusaha mencari dan mengumpulkan data kejadian empiris dalam konteks yang sama dalam evaluasi pelaksanaan Program Bantuan Pembanguna Rumah Layak Huni (BAPERLAHU) di

Kabupaten Mesuji tahun 2019. Saat membuat laporan, peneliti memberikan uraian yang rinci, jelas dan sistematis dan dapat dipercaya. Dengan demikian, maka pembaca menjadi jelas atas hasil penelitian. Penelitian ini dapat digunakan ditempat lain jika hasil penelitian ini sesuai dengan sasaran dan fokus pada tempat tersebut, serta sesuai dengan konsep dimana hasil penelitian ini dilakukan.

3.8.3 Uji Kebergantungan (*Dependability*)

Kebergantungan merupakan substitusi reliabilitas dalam penelitian nonkualitatif. Reliabilitas merupakan syarat bagi validitas. Dalam penelitian kualitatif, uji kebergantungan dilakukan dengan pemeriksaan terhadap keseluruhan proses penelitian. Sering terjadi peneliti tidak melakukan pemeriksaan terhadap keseluruhan proses penelitian ke lapangan, tetapi bisa memberikan data. Peneliti ini perlu diuji *dependability*-nya, dan untuk mengecek apakah hasil penelitian ini benar atau tidak, maka peneliti mendiskusikannya dengan pembimbing. Pengujian *dependability* dalam penelitian ini dilakukan oleh pembimbing untuk mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian.

3.8.4 Uji Kepastian (*Confirmability*)

Kepastian data berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang ada dalam penelitian, jangan sampai proses tidak ada tetapi hasilnya ada. Hal yang dilakukan untuk menguji kepastian ini adalah dengan seminar usul dan seminar hasil dengan mengundang teman sejawat, dosen pembimbing dan dosen pembaha

BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan-temuan di lapangan maka kesimpulan akhir dari pelaksanaan program Bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni (BAPERLAHU) di Kabupaten Mesuji Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

5.1 Kesimpulan

1. Bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni (BAPERLAHU) adalah intervensi pemerintah dalam penyediaan rumah layak huni kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni (BAPERLAHU) di Kabupaten Mesuji Tahun 2019 berhasil menuntaskan sebanyak 322 rumah tidak layak huni (RTLH) di Kabupaten Mesuji. Secara keseluruhan Bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni (BAPERLAHU) di Kabupaten Mesuji Tahun 2019 masih belum optimal. Rancangan program yang dibuat Pemerintah sudah cukup baik, namun dalam pelaksanaan di lapangan, masih banyak kendala yang ditemui seperti adanya penguluran waktu dalam pelaksanaan program di lapangan, kurangnya pengawasan dari pihak dinas, serta kurang efektifnya nilai swadaya masyarakat.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program Bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni (BAPERLAHU) di Kabupaten Mesuji Tahun 2019 antara lain yakni intervensi politik/suasana politik, minimnya tingkat swadaya masyarakat, tingkat disiplin Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM), serta pengawasan oleh pihak Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Mesuji.

5.2 Saran

Dalam rangka untuk peningkatan kualitas dan objektivitas program Bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni (BAPERLAHU) di Kabupaten Mesuji, penulis menguraikan saran yang bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan program Bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni (BAPERLAHU) di Kabupaten Mesuji sebagai berikut :

1. Perlu adanya penambahan jumlah Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) yang disesuaikan dengan pedoman pelaksanaan, supaya program BAPERLAHU tercapai dengan maksimal.
2. Pelaksanaan Program harus sesuai dengan pedoman untuk meminimalisir kesalahan dan kekurangan yang terjadi dalam proses pelaksanaan BAPERLAHU.
3. Harus adanya peningkatan kualitas kerja pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Mesuji untuk memaksimalkan keberhasilan program BAPERLAHU dengan manajemen sistem monitoring yang lebih baik lagi

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

- Akdon. 2007. *Manajemen strategic untuk manajemen pendidikan*. Alfa Beta. Bandung
- Arikunto, Suharsimi. 2009. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Kelima, Rineka Cipta. Jakarta.
- Arikunto, Suharsimi. 2004. *Evaluasi Program Pendidikan Edisi Kedua*. Bumi aksara. Jakarta.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Hayat. 2018. *Kebijakan Publik Evaluasi, Reformasi, Formulasi*. Intrans Publishing. Malang.
- Khori, 2013. *Analisis Pelaksanaan Bantuan Rehabilitas Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2011 di Desa Teluk Siantan Kecamatan Siantan Tengah Kabupaten Kepulauan Anambas*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru, Riau
- Moleong, J. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. PT Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Nurcholis, Hanif. 2007. *Teori dan Praktik : Pemerintah dan Otonomi Daerah*. PT. Grasindo. Jakarta.
- Nugroho, Riant. 2011. *Public Policy ; Dinamika kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen kebijakan*. PT Alex Media Komputindo. Jakarta.

Pepadunnews, 2019. Diakses dari <http://pepadunnews.com/dprd-mesuji-tanyakan-dasar-hukum-baperlahu-2018-yang-dikerjakan-2019/> pada 27 oktober 2019, pukul 19.11 WIB).

Ratih, 2018. *Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Kementerian PUPR Tahun 2017 di Provinsi Kalimantan Barat*. Cakrawala, Jakarta

Ravianto J. 2014. *Produktivitas dan Pengukuran*. Binaman Aksara. Jakarta.

Samarin, 2019 Diakses dari <https://metropolis.co.id/2019/08/25/oknum-kades-di-mesuji-diduga-manipulasi-data-penerima-baperlahu/> pada 20 september 2019, pukul 20.08 WIB

Santosa, Pandji. 2008. *Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance*. PT Refika Aditama. Bandung.

Soedjono. 2005. *Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Organisasi dan Keputusan Kerja Karyawan pada Terminal Penumpang Umum di Surabaya*. Jurnal Manajemen & Kewirausahaan. Surabaya

Soekanto, Soerjono. 2001. *Sosiologi: suatu pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Sunarto, Kamanto. 2004. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.

Sujana Ismaya, dan Sigit Wiharno. *Kamus Besar Ekonomi*. CV Pustaka Grafika. Bandung

Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta. Bandung

Suharno. 2010. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. UNY Press. Yogyakarta

Tresiana, Novita. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Lembaga Penelitian Universitas Lampung. Bandar Lampung.

Widayanti, 2019. *Evaluasi Program Bantuan Stimulan Perumahan swadaya di Kelurahan Tamanan Kecamatan Tulung Agung Kabupaten Tulungagung*. Universitas Negeri Surabaya, Jawa Timur.

Widodo, Joko. 2007. *Analisa Kebijakan Publik*. Bayu Media Publishing. Malang.

Winarno, B. 2007. *Kebijakan Publik, Teori, Proses, dan Studi Kasus edisi dan Revisi Terbaru*. CAPS. Yogyakarta

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Bupati Mesuji No. 39 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni Di Kabupaten Mesuji

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia 2016 Tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan